

## **Analisis *Value For Money* Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

**Zulhelmy Hatta<sup>1</sup>, Emkhad Arif<sup>2</sup>, Nabilah Tyas Garini<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau

Email: emkhadarif@eco.uir.ac.id

### **ABSTRACT**

Persentase angka putus sekolah di Provinsi Riau menempati posisi tertinggi ketiga secara nasional, yaitu sebesar 44,37 persen. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Provinsi Riau 2019, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) masih rendah. Data menunjukkan bahwa APK/APM SMA Provinsi Riau Tahun 2018/2019 APK (82,54) APM (63,81). Sedangkan secara Nasional pada tahun 2020 APK Nasional adalah 97% (dikutip dari Permendikbud nomor 80 tahun 2013 pasal 2 ayat 2). Artinya, APK/APM Provinsi Riau masih Rendah di bawah Nasional. Tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Urusan Wajib, yaitu Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dengan menggunakan prinsip *Value for Money*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan teknik analisis deskriptif, dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 pada Program Pendidikan Menengah dikategorikan ekonomis, cukup efisien, kurang efektif. Sehingga, dapat disimpulkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum sesuai dengan prinsip *value for money*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada data keuangan yang dipakai sebagai alat analisis hanya dua tahun terakhir dan hanya menganalisis aktivitas di satu dinas saja.

**Kata Kunci:** *Kinerja Keuangan, value for money, Akuntabilitas*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia demi berlangsungnya proses pembangunan nasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan masyarakat. Eksistensi pentingnya pendidikan di Indonesia nyata adanya dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Di Indonesia sendiri setiap daerah memiliki Dinas Pendidikan masing-masing, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan di setiap daerahnya. Termasuk di Provinsi Riau yang memiliki Dinas Pendidikan. Adapun visi dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu terwujudnya layanan mutu pendidikan Provinsi Riau yang berdaya saing. Tujuan ini selaras dengan tujuan organisasi sektor publik, yaitu tidak berorientasi pada *profit*, melainkan fokus pada pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, tentu tidak terlepas dari berbagai masalah pendidikan yang mempengaruhinya. Salah satunya berita yang dilansir pada Cakaplah.com, 2020 yang menyebutkan bahwa persentase angka putus sekolah di Provinsi Riau menempati posisi tertinggi ketiga secara nasional, yaitu sebesar 44,37 persen. Berdasarkan data Neraca Pendidikan Provinsi Riau 2019, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni

(APM) masih rendah. Data menunjukkan bahwa APK/APM SMA Provinsi Riau Tahun 2018/2019 APK (82,54) APM (63,81). Sedangkan secara Nasional pada tahun 2020 APK Nasional adalah 97% (dikutip dari Permendikbud nomor 80 tahun 2013 pasal 2 ayat 2). Artinya, APK/APM Provinsi Riau masih Rendah di bawah Nasional.

Dalam pembangunan di bidang pendidikan, APK dan APM menjadi indikator utama untuk melihat tingkat kualitas program pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Melihat fenomena ini, tentunya menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus mampu merencanakan dan memberikan hasil kinerja yang baik berkaitan dengan peningkatan pelayanan di bidang pendidikan. Kinerja yang baik harus dilandaskan dengan akuntabilitas yang baik juga.

*Value for money* adalah konsep pengukuran kinerja yang berdasarkan pada elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Halim dan Kusufi, 2018:128). Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *Value for Money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tuntutan ini sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah harus dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, serta bertanggung jawab yang didasarkan dengan asas keadilan. Melalui *Value for Money* diharapkan organisasi atau instansi pemerintah dapat mengevaluasi kinerja serta dapat meminimalisir pemborosan dan sumber kebocoran dana, karena *Value for Money* dapat memberikan informasi apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan nilai (*value*) bagi masyarakatnya.

Anggaran merupakan salah satu indikator dalam pengukuran kinerja keuangan. Kinerja pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi APBD merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan yang telah direncanakan. Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengimplementasikannya melalui program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja.

Berikut ini adalah data rincian program dan bidang, serta realisasi APBD setiap program pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

**Tabel 1. 1**  
**Program dan Bidang Dinas Pendidikan Provinsi Riau**

No	Program	Bidang
	Program Non Urusan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Sekretariat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat
	Program Urusan Wajib	
4	Program pendidikan menengah	Pendidikan menengah
5	Program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus	PKPLK
6	Program manajemen pelayanan pendidikan	Pendataan

Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau

**Tabel 1. 2**  
**Realisasi APBD Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019**

No.	Program	Tahun (%)	
		2018	2019
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,81	87,11
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50,13	79,52
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	78,34	52,35
4.	Program Pendidikan Menengah	73,65	87,73
5.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	67,24	73,50
6.	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	85,86	53,16

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dan peningkatan atas realisasi anggaran dari beberapa program. Pada Program Urusan Wajib yang merupakan program utama dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mengalami penurunan persentase realisasi anggaran, dan terdapat juga dua program yang mengalami peningkatan persentase realisasi anggaran, yaitu Program Pendidikan Menengah dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus terjadi penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 32,7% (dari 85,86% menjadi 53,16%). Hal ini dikarenakan adanya efisiensi terhadap anggaran dengan tidak dilaksanakannya kegiatan Pengadaan Meubiler PKPLK. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena spesifikasi barang tidak ada yang sama dengan spesifikasi yang ada di *e-catalog*, dan berdasarkan survei di lapangan membutuhkan waktu satu bulan untuk proses lelang, dan untuk pembuatan barang diperkirakan menghabiskan waktu tiga sampai empat bulan karena meubiler untuk siswa SLB disesuaikan dengan kebutuhan (*custom*).

Pada tahun 2019 kegiatan pada Program Pendidikan Menengah dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan bertambah. Hal ini diharapkan dapat menunjang efektivitas pada kedua program tersebut dalam mencapai peningkatan aksesibilitas mutu pendidikan. Sehingga dengan bertambahnya kegiatan dari masing-masing kedua program tersebut, maka penggunaan atau realisasi anggaran pada kedua program tersebut pun meningkat.

Berikut disajikan perbandingan capaian indikator kinerja Dinas pendidikan Provinsi Riau dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan tahun 2018-2019.

**Tabel 1. 3**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APK SMA/SMK/MA/PAKET C (Provinsi)	93,41	82,54	88,36	84,96	86,65	101,99
	APK SM Sederajat (Nasional)			88,55			92,92

APM SMA/SMK/ MA/PAKET C (Provinsi)	70,43	63,81	90,60	61,59	66,86	108,56
APM SM Sederajat (Nasional)			67,14			70,99

*Sumber: LAKIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2018-2019*

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat capaian APK dan APM Provinsi Riau dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun, dari peningkatan capaian kinerja tersebut APK dan APM Provinsi pada tahun 2019 masih dibawah APK dan APM Nasional, yang artinya masih ada 13,35% siswa lagi yang belum bersekolah, dan 19,79% siswa yang bersekolah tidak sesuai kelompok usia.

Hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator APK dan APM Sekolah Menengah Sederajat di Provinsi Riau, antara lain: tingkat ekonomi masyarakat yang belum merata, masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (2019:24) menyatakan bahwa APK dan APM menggambarkan efektivitas suatu program dalam menyerap potensi pendidikan. Semakin tinggi nilainya, maka menunjukkan semakin efektif suatu program.

Melihat fenomena yang telah dipaparkan, yaitu APK dan APM SM Sederajat Provinsi Riau tahun 2018/2019 masih dibawah nasional, sehingga angka putus sekolah pada tingkat SM Sederajat Provinsi Riau tahun tersebut masih dikategorikan tinggi. Maka dari itu, perlu dilakukannya pengukuran kinerja keuangan terhadap program-program yang telah ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, khususnya Program Urusan Wajib yang mana merupakan program utama dalam meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Pada Program Urusan Wajib ini, persentase realisasi anggarannya mengalami peningkatan dan penurunan. Penurunan realisasi anggaran menunjukkan bahwa rendahnya daya serap anggaran, bermakna sisa anggaran berjumlah banyak di akhir tahun. Menurut Mardiasmo (2018:165) menyatakan bahwa ekonomi merupakan jasa *input* dengan kualitas tertentu pada harga terbaik. Jika terjadinya peningkatan biaya mestinya harus disertai dengan peningkatan manfaat yang lebih besar.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Urusan Wajib, yaitu Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, diukur dengan menggunakan prinsip *Value for Money*?". Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Urusan Wajib, yaitu Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, dengan menggunakan prinsip *Value for Money*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Objek penelitian adalah topik permasalahan yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program

Urusan Wajib, yaitu Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau menggunakan metode *value for money*.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) periode tahun 2018 dan 2019, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018 dan 2019. Data sekunder (*secondary data*) mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran dan Bougie, 2017:130). Data sekunder dalam Penelitian ini adalah berupa literatur, jurnal, buku, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan analisis *Value for Money* pada pengukuran kinerja sektor publik sebagai penunjang dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti mengukur kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, menggunakan metode pengukuran kinerja *Value for Money*. *Value for Money* merupakan metode pengukuran kinerja yang berlandaskan pada tiga indikator, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Perhitungan Ekonomi:

Rumus mengukur tingkat ekonomi (Mahsun, 2020:186):

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomi menurut Mahsun (2020:186) adalah:

1. < 100% maka dinyatakan ekonomis,
2. = 100% maka dinyatakan ekonomi berimbang,
3. >100% maka dinyatakan tidak ekonomis.

Berikut perhitungan ekonomi Program Pendidikan Menengah pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi} &= \frac{37.351.308.035,00}{47.986.636.000,00} \times 100\% \\ &= 77,84\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan ekonomi pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA Program Pendidikan Menengah tahun 2018 diperoleh sebesar 77,84%, sehingga kinerja pada kegiatan tersebut dikategorikan ekonomis. Hasil analisis data mengenai perhitungan ekonomi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, terdapat 30 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 2.3**

### **Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi**

Kriteria	Jumlah kegiatan	Persentase (%)
Ekonomis	30	100
Ekonomi Berimbang	0	0
Tidak ekonomis	0	0
<b>Jumlah</b>	30	100

Sumber: Data diolah, 2021

- Pada tahun 2019, terdapat 42 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Ekonomi**

Kriteria	Jumlah kegiatan	Persentase (%)
Ekonomis	41	97,62
Ekonomi Berimbang	1	2,38
Tidak ekonomis	0	0
<b>Jumlah</b>	42	100

Sumber: Data diolah, 2021

Perhitungan Efisiensi

Rumus mengukur tingkat efisiensi ialah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Persentase Capaian Kinerja}}{\text{Persentase Capaian Anggaran}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria, menurut Mahsun (2020:187):

- < 100% maka dinyatakan tidak efisien,
- = 100% maka dinyatakan efisiensi berimbang,
- >100% maka dinyatakan efisien.

Berikut perhitungan efisiensi Program Pendidikan Menengah pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA tahun 2018:

$$\text{Efisiensi} = \frac{100\%}{77,84\%} \times 100\% = 128,47\%$$

Hasil perhitungan efisiensi pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA Program Pendidikan Menengah tahun 2018 diperoleh sebesar 128,47%, sehingga kinerja pada kegiatan tersebut dikategorikan efisien.

Hasil analisis data mengenai perhitungan efisiensi kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, terdapat 30 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efisien	18	60
Efisiensi Berimbang	0	0
Tidak Efisien	12	40
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

- Pada tahun 2019, terdapat 42 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efisiensi**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efisien	27	64,29
Efisiensi Berimbang	1	2,38
Tidak Efisien	14	33,33
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

Perhitungan Efektivitas

Rumus mengukur tingkat efektivitas ialah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Berikut perhitungan efektivitas Program Pendidikan Menengah pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA tahun 2018:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{46 \text{ sekolah}}{46 \text{ sekolah}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan efektivitas pada kegiatan pengadaan media pembelajaran SMA Program Pendidikan Menengah tahun 2018 diperoleh sebesar 100% , sehingga kinerja pada kegiatan tersebut dikategorikan efektivitas berimbang.

Hasil analisis data mengenai perhitungan efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2018, terdapat 30 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 4**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2018 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efektif	0	0
Efektivitas Berimbang	11	36,67
Tidak Efektif	19	63,33
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

2. Pada tahun 2019, terdapat 42 kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah, yang terdiri atas:

**Tabel 4. 5**  
**Jumlah kegiatan Program Pendidikan Menengah Tahun 2019 Berdasarkan Kriteria Perhitungan Efektivitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kegiatan</b>	<b>Persentase (%)</b>
Efektif	0	0
Efektivitas Berimbang	22	52,38
Tidak Efektif	20	47,62
<b>Jumlah</b>	<b>42</b>	<b>100</b>

*Sumber: Data diolah, 2021*

## **Pembahasan**

Analisis *Value for Money* Program Pendidikan Menengah:

### 1. Perhitungan Ekonomi

Pada periode tahun 2018, keseluruhan kegiatan Program Pendidikan Menengah memperoleh perhitungan ekonomi yang sangat baik. Hasil analisis menunjukkan dari 30 kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, seluruh kegiatannya dinyatakan ekonomis yaitu memperoleh nilai dibawah 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 16 kegiatan, persentase 50-100% berjumlah 14 kegiatan. Artinya, pada Program Pendidikan Menengah tahun 2018, Dinas Pendidikan Provinsi Riau mampu menggunakan dana dengan hemat, yaitu kurang dari anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp543.636.247.877,17 dengan realisasi sebesar Rp400.376.135.996,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp143.260.111.881,17.

Pada Tabel 4.4 hasil analisis menunjukkan bahwa dari 42 kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Pendidikan Menengah tahun 2018, diantaranya terdiri dari 41 kegiatan dinyatakan ekonomis, karena nilai perhitungan ekonomi diperoleh kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 15 kegiatan, dan persentase 50-100% berjumlah 26 kegiatan. Dikatakan ekonomis, artinya Dinas Pendidikan Provinsi Riau mampu meminimalisir pemborosan dalam penggunaan dana. Sebagaimana Mardiasmo (2018:165) menyatakan bahwa ekonomi merupakan kehematan mencakup pengelolaan secara hati-hati dan cermat, tidak adanya pemborosan, yaitu mampu mengurangi biaya yang tidak perlu. Selain itu, terdapat 1 kegiatan yang dinyatakan ekonomi berimbang, yaitu nilai ekonomi diperoleh sama dengan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada kegiatan tersebut, yaitu kegiatan pembangunan USB SMA dan kelengkapannya, penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan

pada tahun 2019. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp456.361.160.545,00 dengan realisasi sebesar Rp400.381.745.668,13. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp55.979.414.876,87.

## 2. Perhitungan Efisiensi

Perhitungan efisiensi seluruh kegiatan pada Program Pendidikan Menengah periode tahun 2018 dapat dikatakan cukup efisien. Kinerja suatu organisasi dikatakan efisien, apabila tingkat perhitungan efisiensi memperoleh hasil lebih dari 100%. Pada Tabel 4.15 hasil analisis menunjukkan dari 30 kegiatan yang telah dilaksanakan pada Program Pendidikan Menengah periode tahun 2018, hanya 18 kegiatan yang dinyatakan efisien. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mampu menghasilkan hasil kerja yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang rendah yang rendah melalui 18 kegiatan yang telah dinyatakan efisien, yang mana 18 kegiatan tersebut memperoleh nilai tingkat efisiensi lebih dari 100%.

Perhitungan efisiensi pada periode tahun 2019, hasil analisis pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 42 kegiatan yang telah dilaksanakan, hanya 27 kegiatan yang dinyatakan efisien, pada 27 kegiatan tersebut, telah mampu memperoleh nilai lebih dari 100% sehingga Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah dinyatakan cukup efisien.

## 3. Perhitungan Efektivitas

Perhitungan efektivitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja berupa program ataupun kegiatan yang dijalankan telah mencapai tujuan. Perhitungan efektivitas pada Program Pendidikan Menengah periode tahun 2018 memperoleh hasil yang kurang efektif. Pada Tabel 4.27 hasil analisis menunjukkan dari 30 kegiatan, hanya 11 kegiatan yang dinyatakan efektivitas berimbang, yaitu kegiatan yang tingkat efektivitasnya mencapai 100 (=100%), artinya hasil kinerja dari 11 kegiatan tersebut sesuai dengan target yang diharapkan. Sedangkan kegiatan yang dinyatakan tidak efektif bernilai lebih besar, yaitu 19 kegiatan. Kegiatan yang masuk dalam kriteria efektif pada program ini berjumlah 0. Artinya, tidak ada kegiatan yang memperoleh nilai efektivitas lebih dari 100%. Kegiatan yang dilaksanakan tidak ada yang melebihi dari target yang ditentukan, hanya berjalan sesuai dengan target.

Perhitungan efektivitas pada Program Pendidikan Menengah periode tahun 2019, mengalami peningkatan nilai efektivitas dari tahun sebelumnya (2018). Namun, tetap dikategorikan kurang efektif. Pada Tabel 4.28 hasil analisis menunjukkan dari 42 kegiatan, hanya 22 kegiatan yang dinyatakan efektivitas berimbang, sedangkan sisanya yaitu 20 kegiatan dinyatakan tidak efektif. Perbandingan jumlah kegiatan yang bernilai efektivitas berimbang dengan kegiatan yang tidak efektif, terlihat tidak menunjukkan perbandingan jumlah yang signifikan. Sedangkan untuk kegiatan berkriteria efektif pada program ini berjumlah 0. Artinya, kegiatan yang dilaksanakan tidak ada yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, hanya berjalan sesuai dengan target.

## **Analisis *Value for Money* Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

### 1. Perhitungan Ekonomi

Perbandingan *input* dan harga *input* pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan periode tahun 2018 dan 2019, diperoleh hasil perhitungan ekonomi bernilai sangat ekonomis. Pada tahun 2018, sebanyak 29 kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, seluruhnya dinyatakan ekonomis, karena memperoleh nilai perhitungan ekonomi kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 6 kegiatan, dan persentase 50-100% berjumlah 23 kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp71.663.802.630,00

dengan realisasi sebesar Rp48.190.093.505,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp23.473.709.125.

Pada tahun 2019, Hasil analisis menunjukkan dari seluruh kegiatan yang berjumlah 32 kegiatan, ada 31 kegiatan yang dinyatakan ekonomis, karena memperoleh nilai perhitungan ekonomi kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 2 kegiatan dan persentase 50-100% berjumlah 29 kegiatan. Artinya pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan periode tahun 2018 dan 2019, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat dalam penggunaan dana. Kemudian, terdapat 1 kegiatan yang bernilai ekonomis berimbang, karena memperoleh nilai ekonomi sama dengan 100%. Kegiatan tersebut adalah kegiatan Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp80.253.025.300,00 dengan realisasi sebesar Rp58.984.453.844,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp21.268.571.456,00.

## 2. Perhitungan Efisiensi

Perhitungan efisiensi pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2018, memperoleh hasil yang dapat dikatakan efisien. Pada tabel 4.19 hasil analisis menunjukkan dari jumlah 29 kegiatan yang dilaksanakan, 25 kegiatan dinyatakan efisien, dan hanya 4 kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. 25 kegiatan yang dinyatakan efisien, karena memperoleh nilai efisiensi lebih dari 100%. 25 kegiatan tersebut, mampu menghasilkan *output* sesuai target dengan penggunaan *input* kurang dari anggaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan efisiensi pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2019, juga memperoleh hasil yang dapat dikatakan efisien. Pada Tabel 4.20 hasil analisis menunjukkan bahwa dari 32 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 27 kegiatan yang dinyatakan efisien yaitu memperoleh hasil nilai efisiensi lebih dari 100%, dan hanya 5 kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. 27 kegiatan ini mampu menghasilkan *output* sesuai target dengan penggunaan *input* kurang dari anggaran yang telah ditetapkan.

## 3. Perhitungan Efektivitas

Perhitungan efektivitas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan periode tahun 2018 dan 2019 dapat dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2018, tabel 4.31 hasil analisis menunjukkan bahwa dari 29 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 25 kegiatan yang dinyatakan efektivitas berimbang, karena memperoleh nilai efektivitas sama dengan 100%. Hasil kinerja yang sesuai target pada program ini, diimplementasikan pada 25 kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 4 kegiatan yang dinyatakan tidak efektif, karena hasil kinerja yang dihasilkan tidak mencapai target. Sedangkan untuk kegiatan yang berkriteria efektif, pada program ini berjumlah 0. Artinya, tidak ada kegiatan yang memperoleh nilai efektivitas lebih dari 100%. Kegiatan hanya berjalan sesuai target, tanpa ada upaya untuk melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, dari 32 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 25 kegiatan yang memperoleh nilai efektivitas berimbang, karena perhitungan efektivitas pada 25 kegiatan tersebut memperoleh nilai sama dengan 100%. Kemudian, terdapat 7 kegiatan yang memperoleh nilai kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, nilai kurang dari 100% dinyatakan tidak efektif. Artinya, 7 kegiatan tersebut belum berhasil dalam menghasilkan hasil kerja yang mencapai target, dan 0 kegiatan yang termasuk dalam kriteria efektif.

## Analisis *Value for Money* Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

### 1. Perhitungan Ekonomi

Perhitungan ekonomi pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus periode tahun 2018 dan 2019, diperoleh hasil bernilai ekonomis. Pada tahun 2018, sebanyak 17 kegiatan yang dilaksanakan pada program ini, seluruhnya dinyatakan ekonomis karena memperoleh nilai perhitungan ekonomi kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 3 kegiatan, dan persentase 50-100% berjumlah 14 kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp43.890.299.230,00 dengan realisasi sebesar Rp37.519.038.717,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp6.371.260.513,00.

Pada tahun 2019, Hasil analisis menunjukkan dari seluruh kegiatan yang berjumlah 21 kegiatan, seluruh kegiatannya juga yang dinyatakan ekonomis, karena memperoleh nilai perhitungan ekonomi kurang dari 100% yang terdiri dari persentase 0-50% berjumlah 3 kegiatan, dan persentase 50-100% berjumlah 18 kegiatan. Anggaran untuk seluruh kegiatan pada program ini sebesar Rp84.055.679.800,00 dengan realisasi sebesar Rp44.682.864.464,00. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program ini, Dinas Pendidikan Provinsi Riau telah berhemat sebesar Rp39.372.815.336,00.

## 2. Perhitungan Efisiensi

Perhitungan efisiensi pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tahun 2018, memperoleh hasil yang dapat dikatakan efisien. Pada Tabel 4.23, hasil analisis menunjukkan dari jumlah 17 kegiatan yang dilaksanakan, 15 kegiatan dinyatakan efisien, dan hanya 2 kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. 15 kegiatan yang dinyatakan efisien, karena memperoleh nilai efisiensi lebih dari 100%. 15 kegiatan tersebut, mampu menghasilkan *output* sesuai target dengan penggunaan *input* kurang dari anggaran yang telah ditetapkan.

Pada Tabel 4.24, menunjukkan bahwa dari 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Program Khusus dan Layanan Khusus tahun 2019, 16 kegiatan dinyatakan masuk ke dalam kriteria efisien, dan hanya 5 kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Sehingga kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada program ini dapat dikatakan cukup efisien.

## 3. Perhitungan Efektivitas

Perhitungan efektivitas pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus periode tahun 2018 dan 2019 dapat dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2018, Tabel 4.35 menunjukkan bahwa dari 17 kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 15 kegiatan yang dinyatakan efektivitas berimbang, karena memperoleh nilai efektivitas sama dengan 100%. Hasil kinerja yang sesuai target pada program ini, diimplementasikan pada 15 kegiatan tersebut. Kemudian, terdapat 2 kegiatan yang dinyatakan tidak efektif, karena hasil kinerja yang dihasilkan tidak mencapai target.

Pada tahun 2019, Tabel 4.36 menunjukkan bahwa dari 21 kegiatan yang dilaksanakan terdapat 1 kegiatan yang dikatakan efektif, karena nilai efektivitas yang diperoleh lebih dari 100%. Kegiatan tersebut adalah kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana PKPLK. Kegiatan tersebut mampu menghasilkan kinerja melebihi target yang telah direncanakan. Kegiatan ini, merupakan satu-satunya yang memenuhi kriteria dari 3 indikator *value for money*. Kemudian, terdapat 15 kegiatan yang memperoleh nilai efektivitas berimbang, karena perhitungan efektivitas pada 15 kegiatan tersebut memperoleh nilai sama dengan 100%. Kemudian, terdapat 5 kegiatan yang memperoleh nilai kurang dari 100%. Berdasarkan kriteria efektivitas, nilai kurang dari 100% dinyatakan tidak efektif.

Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2018 dan 2019 pada seluruh program dikategorikan ekonomis, cukup efisien, namun kurang efektif. Banyak kegiatan dari setiap program, memperoleh nilai efektivitas berimbang, yaitu nilai sama dengan 100% artinya realisasi kinerja sudah sesuai dengan target, namun yang memenuhi kriteria efektif, yaitu nilai efektivitas lebih dari 100% hanya satu kegiatan yaitu kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana PKPLK pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Riau masih menjalankan kegiatan dari setiap programnya hanya sesuai dengan target, tanpa adanya upaya untuk melampaui dari target yang telah ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan, akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan: kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Menengah tahun 2018-2019, dikategorikan ekonomis, cukup efisien, dan kurang efektif. Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada Program Pendidikan Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2018-2019, dikategorikan ekonomis, efisien, dan kurang efektif. Kinerja keuangan pada Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus tahun 2018-2019, dikategorikan ekonomis, efisien, dan kurang efektif. Kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum memenuhi prinsip *value for money*.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada data keuangan yang dijadikan sebagai alat analisis hanya terdiri dari dua tahun saja, sehingga mengurangi nilai comparability dan kemampuan untuk melakukan *prediktif value* di tahun-tahun selanjutnya, selanjutnya keterbatasan penelitian terletak pada subjek penelitian yang hanya menjadikan satu subjek saja, sehingga penelitian selanjutnya sebaiknya menambah subjek penelitian menjadi dua atau tiga subjek penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Saran tersebut mencakup: Dinas Pendidikan Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan lebih memperhatikan prinsip *value for money* dalam mengevaluasi dan mengelola kinerja di masa yang akan datang dan harus melakukan estimasi anggaran belanja dengan model-model yang relevan, guna meminimalisir penetapan anggaran yang terlalu tinggi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R. D., & Anang, Subarjo. 2017. Konsep Value for Money dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6 (6): 1–15.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ardila, Isna., & Ayu Anindya Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15 (1): 52–64.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2019. *Statistik Pendidikan Provinsi Riau 2019*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik.
- Barr, J., & Chistie, A. 2015. Improving the Practice of Value for Money. *Centre for Development Impact*, 12: 1–9.
- Bastian, Indra. 2016. *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwinanda, Yosie. 2018. *Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja*

- pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta.
- Halim, Abdul., & Muhammad Syam Kusufi. 2018. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastoro, H. A. 2016. Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18 (1): 53. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i1.480>.
- Hermawan, I. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan.
- Jakupec, V., & Kelly, Max. 2016. Assessing the Impact of Foreign Aid: Value for Money and Aid for Trade. In *Assessing the Impact of Foreign Aid: Value for Money and Aid for Trade*. <https://doi.org/10.1016/C2015-0-00255-6>.
- Mahmudi. 2018. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Mahsun, Mohamad. 2020. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Ningsih, N. N., Masyithoh, S., & Abni, I. 2017. Analisis kinerja kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berdasarkan value for money. *Journal KINERJA*, 14(1): 52–60.
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J. 2020. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8 (4): 781–788. <https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.31072>.
- Pratiwi, W. 2016. *Audit Sektor Publik*. Bogor: In Media.
- Putra, S. Y. 2020. "Angka Putus Sekolah di Riau Tertinggi ke 3 Nasional, DPRD Sebut Gara-gara Ruang Kelas Terbatas." <https://www.cakaplah.com/berita/baca/55558/2020/06/26/angka-putus-sekolah-di-riau-tertinggi-ke-3-nasional-dprd-sebut-garagara-ruang-kelas-terbatas#sthash.YENJ3gBx.dpbs>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2020.
- Putri, Nur Zeni Amilia. 2020. *Analisis Value for Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya.
- Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. 2018. Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4 (1): 31–43. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10912>.
- Sekaran, U., & Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, K. W. 2015. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19 (1): 4. Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Yang Mengatur Tentang Keuangan Negara. Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Yang Mengatur Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Yang Mengatur Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau. Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 47 Tahun

- 2008 Yang Mengatur Tentang Wajib Belajar.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Yang Mengatur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Yang Mengatur tentang Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Yang Mengatur Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.